

**FUNGSI DINAS SOSIAL KABUPATEN PIDIE DALAM UPAYA
MENURUNKAN ANGKA KEMISKINAN**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

RESYA AZKIYA JUNDA
NIM. 210802087

**Mahasiswa Fakultas Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2024 M/1446 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Resya Azkiya Junda
NIM : 210802087
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Tempat Tanggal Lahir : Beureunuen, 30 Maret 2003
Alamat : Lampulo, Kuta Alam, Banda Aceh

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya

Banda Aceh,
Yang Menyatakan



Resya Azkiya Junda
NIM. 210802087

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING
FUNGSI DINAS SOSIAL KABUPATEN PIDIE DALAM UPAYA
MENURUNKAN ANGKA KEMISKINAN

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu syarat untuk Memperoleh Gelar
Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Oleh:

RESYA AZKIYA JUNDA

NIM.210802087

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing


Dr. Said Amirulkamar, M.M., M.Si

NIP. 196110051982031007

LEMBAR PENGESAHAN

**FUNGSI DINAS SOSIAL KABUPATEN PIDIE DALAM UPAYA
MENURUNKAN ANGKA KEMISKINAN**

SKRIPSI

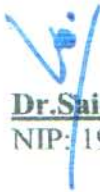
Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 09 Januari 2025

Banda Aceh,

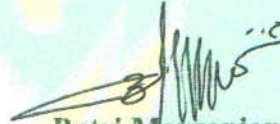
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

KETUA




Dr. Said Amirulkamar, MM., M.Si
NIP: 196110051982031007

SEKRETARIS



Putri Marzaniar, M.P.A.
NIP: 199811022024032001

PENGUJI I



Ferry Setiawan, S.E., Ak., M.Si
NIP: 197802032005041001

PENGUJI II



Cut Zamharira, S.IP., M.AP
NIP: 197911172023212012

Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Dr. Muji Mulia, S.Ag., M.Ag.
NIP: 197403271999031005

ABSTRAK

Kemiskinan merupakan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh Pemerintah Indonesia, khususnya di Provinsi Aceh, termasuk Kabupaten Pidie yang tercatat sebagai salah satu daerah termiskin. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fungsi Dinas Sosial Kabupaten Pidie dalam upaya menurunkan angka kemiskinan melalui program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Metode kualitatif deskriptif digunakan untuk menggali data dan informasi mengenai pelaksanaan program yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Sosial telah merancang berbagai program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Namun, tantangan dalam pelaksanaannya tetap ada, seperti kurangnya akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja yang layak. Evaluasi menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan sangat penting untuk mencapai keberhasilan program. Meskipun terdapat dampak positif dari inisiatif yang diterapkan, masih diperlukan perbaikan dalam akuntabilitas dan kesetaraan akses. Penelitian ini menyoroti peran strategis Dinas Sosial dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas program yang ada. Melalui penguatan kolaborasi dan partisipasi masyarakat, diharapkan upaya penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Pidie dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Dengan demikian, kualitas hidup masyarakat di daerah ini dapat meningkat, memberikan harapan baru bagi Pembangunan Sosial dan ekonomi yang lebih baik di masa depan.

Kata Kunci : Kemiskinan, Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Program Perlindungan Sosial, Kabupaten Pidie, SDGs.

KATA PENGANTAR



Syukur alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir yang berjudul **“Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Pidie Dalam Upaya Menurunkan Angka Kemiskinan”**. Shalawat dan juga salam kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW.

Dalam penulisan tugas akhir ini, penulis menyadari bahwa ada banyak kesalahan dan kekurangan. Namun bantuan dari berbagai pihak Alhamdulillah penulis mampu menyelesaikannya. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya penulisan ini. Penulis tidak akan melupakan jasa baik semuanya, dan semoga Allah SWT membalas amal dan budi baik kalian semua. Mudah-mudahan apa yang penulis tuangkan dalam skripsi ini dapat menambahkan informasi dan dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Untuk itu, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada:

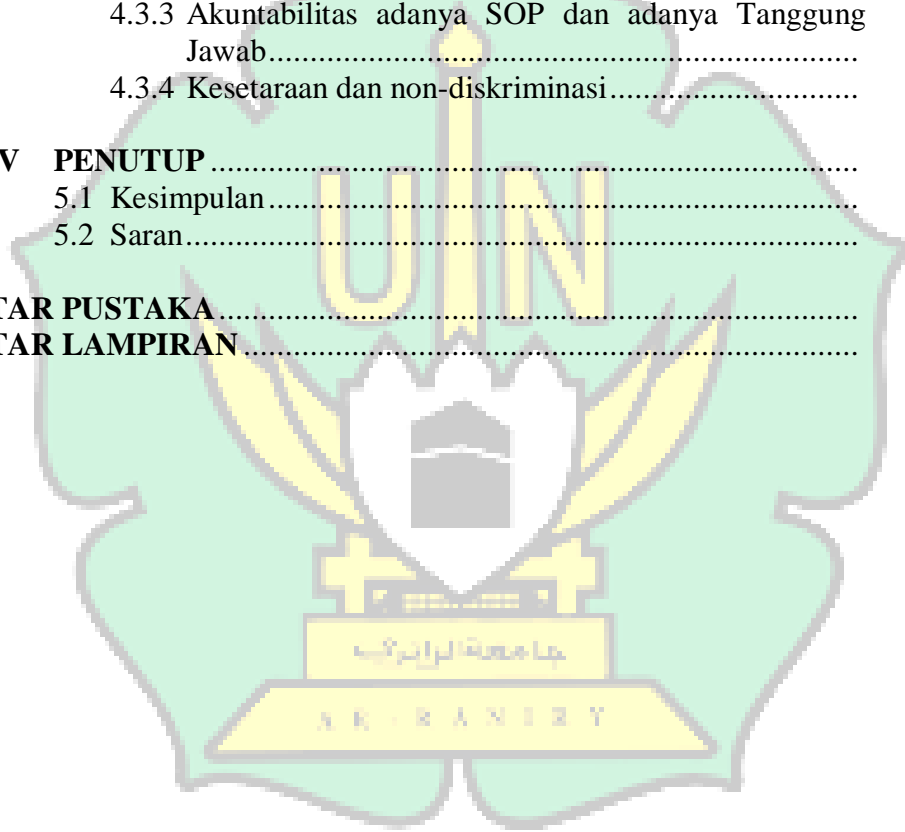
1. Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag. selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Muji Mulia, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry.
3. Muazzinah, B.Sc., MPA. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Delfi Suganda, LL.M. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Dr. Said Amirulkamar, M.M., M.Si. selaku Dosen Pembimbing I saya yang telah mengarahkan dan membimbing selama studi saya
6. Teristimewa kepada Abu dan Umi serta Keluarga yang menjadi support sistem utama yang sudah selalu mendoakan dan mendorong penulis untuk menyelesaikan tugas akhir sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

7. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, Khairuzan Aqil. Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup saya. Berkontribusi banyak dalam penulisan karya tulis ini, baik tenaga, waktu, maupun materi kepada saya. Telah menjadi rumah, pendamping dalam segala hal yang menemani, mendukung maupun menghibur dalam kesedihan, mendengar keluh kesah, memberi semangat untuk pantang menyerah. Semoga Allah selalu memberi keberkahan dalam segala hal yang dilalui.
8. Teruntuk Yuliza dan Kawan-kawan yang kebersamai selama proses penulisan tugas akhir ini. Terimakasih sudah menjadi partner bertumbuh di segala kondisi yang terkadang tidak terduga, menjadi pendengar yang baik untuk penulis serta menjadi orang yang selalu memberikan semangat dan meyakinkan penulis bahwa segala masalah yang dihadapi selama proses skripsi akan terakhir.
9. Terakhir, terimakasih untuk diri sendiri. Resya Azkiya Junda. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Terima kasih tetap memilih berusaha dan merayakan dirimu sendiri sampai di titik ini, walau sering kali merasa putus asa atas apa yang diusahakan dan belum berhasil, namun terima kasih tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah mencoba. Terima kasih karena memutuskan tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dan telah menyelesaikannya sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri. Berbahagialah selalu di manapun berada, Resya Apapun kurang dan lebihmu mari merayakan diri sendiri.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah dan Identifikasi Masalah	6
1.2.1 Identifikasi Masalah.....	6
1.2.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	7
1.4.2 Manfaat Praktis.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Penelitian Terdahulu	8
2.2 Teori/Konsep	13
2.2.1 Teori Fungsi.....	13
2.2.2 Teori Kemiskinan.....	18
2.2.3 Konsep Kesejahteraan	23
2.3 Kerangka Pemikiran.....	26
BAB III METODE PENELITIAN	27
3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian	27
3.2 Sumber Data	27
3.2.1 Data Primer.....	27
3.2.2 Data Sekunder.....	28
3.3 Fokus Penelitian.....	29
3.4 Lokasi Penelitian.....	30
3.5 Informasi Penelitian	30
3.6 Teknik Pengumpulan Data	30
3.6.1 Wawancara	30
3.6.2 Observasi.....	31
3.6.3 Dokumentasi.....	32
3.7 Teknik Pemeriksaan dan Keabsahan Data	34

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
4.1 Gambaran Umum Dinas Sosial Kabupaten Pidie	38
4.1.1 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Pidie....	39
4.1.2 Visi dan Misi Dinas Sosial Kabupaten Pidie.....	39
4.2 Hasil Penelitian	40
4.2.1 Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Pidie dalam menurunkan angka kemiskinan	40
4.2.2 Program-Program Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Kabupaten Pidie dalam Upaya Menurunkan Angka Kemiskinan.	48
4.3 Pembahasan Hasil Penelitian	54
4.3.1 Pelaksanaan Program Kerja dan Tanggung Jawab	54
4.3.2 Evaluasi dan Pelaporan	54
4.3.3 Akuntabilitas adanya SOP dan adanya Tanggung Jawab.....	55
4.3.4 Kesetaraan dan non-diskriminasi.....	56
BAB V PENUTUP	59
5.1 Kesimpulan	59
5.2 Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	61
DAFTAR LAMPIRAN	63



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Penduduk miskin di Kabupaten Pidie	4
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu.....	8
Tabel 3.1	Dimensi dan Indikator teori fungsi.....	29
Tabel 3.2	Dimensi dan Indikator rancangan perlindungan	29
Tabel 3.3	Informan Kajian.....	30
Tabel 4.1	Program Kerja Dinas Sosial Kabupaten Pidie.....	42



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur organisasi Dinsos Kabupaten Pidie 39



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara	63
Lampiran 2. Fokus Dokumentasi Wawancara.....	65
Lampiran 3. Surat Keterangan Sudah Selesai Melakukan Penelitian	68



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh Pemerintah Indonesia, termasuk Provinsi Aceh yang tercatat sebagai salah satu provinsi termiskin pada tingkat Nasional, termasuk Kabupaten Pidie. Pemerintah yang memiliki tanggung jawab langsung terhadap kesejahteraan sosial masyarakat. Di tengah dinamika sosial dan ekonomi yang terus berubah, angka kemiskinan di Kabupaten Pidie menunjukkan perubahan yang memerlukan perhatian serius. Salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat Kemiskinan adalah kurangnya akses masyarakat terhadap Pendidikan, Kesehatan, dan Peluang Kerja yang layak¹.

Kemiskinan merupakan salah satu tantangan paling kompleks yang dihadapi oleh Pemerintah Indonesia, termasuk di Provinsi Aceh yang dikenal sebagai salah satu provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di nasional, terutama di Kabupaten Pidie. Sebagai entitas yang bertanggung jawab atas Kesejahteraan Sosial Masyarakat, Pemerintah perlu menghadapi isu ini dengan serius. Dalam perubahan dinamika Sosial dan ekonomi yang cepat, data kemiskinan di Kabupaten Pidie menunjukkan bahwa ada kebutuhan mendesak untuk memberikan perhatian lebih.

Salah satu penyebab utama tingginya angka kemiskinan adalah terbatasnya akses masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas, layanan kesehatan yang memadai, serta peluang kerja yang layak. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan aksesibilitas dalam bidang-bidang tersebut sangat penting untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah ini.

¹ Masfi Sya'fiatul Ummah, "Peran Baitul MAL DALAM MENGURANGI ANGKA KEMISKINAN DI KOTA BANDA ACEH PROVINSI ACEH," *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2019): 1–14, http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.

Kementerian Sosial menjalankan peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang sosial, dengan tujuan membantu Presiden dalam menjalankan tugas negara. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 110 tahun 2021 tentang Kementerian Sosial, kementerian ini bertanggung jawab atas perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, serta penanganan fakir miskin.

Fokus utama Kementerian Sosial adalah pada kegiatan sosial dan pengabdian kepada masyarakat, serta koordinasi berbagai program sosial yang ada. Dalam konteks pelaksanaan tugas pemerintah yang diamanatkan oleh pembukaan UUD 1945, Kementerian Sosial berkomitmen untuk memajukan kesejahteraan umum. Melalui berbagai upaya, kementerian ini bertekad untuk meningkatkan taraf hidup, kualitas, dan keberlanjutan kehidupan bagi fakir miskin, kelompok rentan, dan orang-orang tidak mampu, sehingga dapat berkontribusi dalam penurunan angka kemiskinan di negara ini.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan dua strategi utama yang meliputi pengurangan beban pengeluaran dan peningkatan pendapatan. Selain itu, kementerian juga berusaha mengatasi ketimpangan dan kesenjangan dalam kantong-kantong kemiskinan, serta meningkatkan profesionalisme dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Dalam menjalankan tugasnya, Kementerian Sosial dituntut untuk menerapkan prinsip-prinsip good governance, termasuk transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap program dan kebijakan yang diimplementasikan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat, serta membangun kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Salah satu Program untuk mengatasi masalah kemiskinan adalah dengan Peran Kementerian Sosial (Kemensos) mendukung suatu Program Sustainable Development Goals (SDGs) yang dijalankan oleh PBB.

Program Sustainable Development Goals (SDGs) adalah inisiatif global yang diadopsi oleh negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

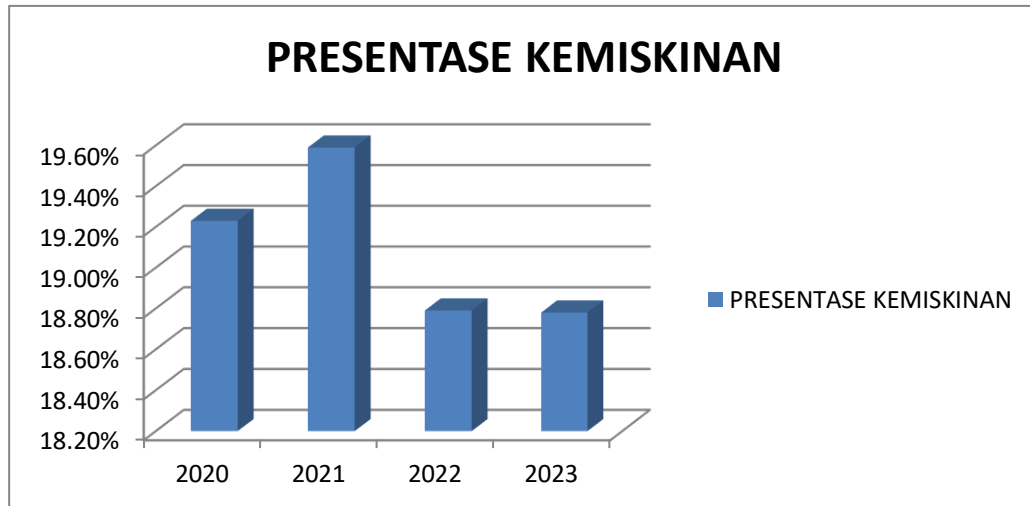
pada tahun 2015. SDGs terdiri dari 17 tujuan, yang bertujuan untuk mengatasi berbagai tantangan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang dihadapi dunia, termasuk pengentasan kemiskinan, perlindungan lingkungan, dan pencapaian kesetaraan gender. Setiap tujuan memiliki target dan indikator yang spesifik, yang dirancang untuk dicapai pada tahun 2030. Program ini menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan individu untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. SDGs berupaya menciptakan dunia yang lebih baik dan lebih berkelanjutan bagi generasi mendatang.

Tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) adalah untuk membuat kemajuan progresif dalam menghilangkan kemiskinan dan kelaparan dan mengurangi ketidaksetaraan di Negara. Masih banyak kendala dalam mengimplementasikan *sustainable development goals* yaitu perluasan. Banyak daerah yang mempunyai tingkat kemiskinan yang berbeda-beda, yang dipengaruhi oleh kondisi wilayah, peraturan daerah, serta jumlah dan persentase penduduk. Salah satu provinsi termiskin di Indonesia adalah Provinsi Aceh, terutama di Pulau Sumatera. Dari data statistik bahwa Provinsi Aceh termasuk di antara 10 Provinsi termiskin di Indonesia.²

Berdasarkan data yang dirilis, persentase penduduk miskin yang ada di Kabupaten Pidie pada tahun dan 2023 tercatat 18,78% penduduk Kabupaten Pidie masih hidup di bawah garis kemiskinan. Dalam upaya mengimplementasikan Program Pemerintah untuk mengurangi kemiskinan guna mendukung *Sustainable Development Goals* (SDGs) untuk menurunkan angka kemiskinan, Dinas Sosial Kabupaten Pidie telah merancang dan menjalankan berbagai strategi dan program yang komprehensif. Strategi-strategi tersebut mencakup peningkatan kualitas dan jangkauan program-program perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat miskin, serta kolaborasi dengan stakeholder terkait, Dinas Sosial berharap dapat mempercepat laju penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Pidie dan mendukung program pemerintah mengurangi tingkat kemiskinan guna mendukung mencapai target SDGs yang telah ditetapkan .

² Diakses dari <https://www.bps.go.id/id>, Pada Juli 2024

Tabel 1.1
Penduduk miskin di Kabupaten Pidie



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pidie Tahun 2024

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Pidie Nomor 8 Tahun 2017 “Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Pidie”. Dalam pasal 5 dan 6 “berbunyi Dinas Sosial Kabupaten Pidie mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintah Bidang Sosial dan urusan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah”.

Dinas Sosial Kabupaten Pidie memiliki beragam tugas, salah satu tugas utamanya adalah pemberdayaan masyarakat melalui program-program yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan. Dinas Sosial Kabupaten Pidie juga menyediakan layanan sosial bagi kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas, lanjut usia, dan anak-anak.

Selain itu, Dinas Sosial Kabupaten Pidie terlibat dalam penanganan kemiskinan dengan mengidentifikasi dan mengatasi masalah tersebut melalui berbagai program bantuan sosial. Mereka menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan keterampilan untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat. Penyaluran bantuan sosial, baik dari pemerintah pusat maupun daerah, juga menjadi bagian penting dari tugas Dinas Sosial Kabupaten Pidie.

Dalam upaya menjaga stabilitas sosial, Dinas Sosial Kabupaten Pidie

melakukan pencegahan dan penanganan konflik sosial dengan mengidentifikasi potensi konflik dan melakukan mediasi. Selain itu, mereka melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap program-program sosial untuk memastikan efektivitasnya, serta menjalin kerjasama dengan lembaga sosial dan organisasi masyarakat lainnya.

Dengan demikian, Dinas Sosial Kabupaten Pidie berperan penting dalam menciptakan kesejahteraan sosial dan mengatasi berbagai masalah yang dihadapi masyarakat. Dinas Sosial Kabupaten Pidie berperan sebagai lembaga yang mendukung kebijakan dan program pemerintah daerah yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial masyarakat, termasuk penyelenggaraan program bantuan Sosial, pengembangan masyarakat, serta penanganan masalah Sosial seperti kemiskinan dan ketidakadilan sosial.

Dengan adanya peraturan ini, diharapkan Dinas Sosial dapat berfungsi dengan efektif, berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat. Tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah menegaskan bahwa Dinas Sosial juga bertanggung jawab untuk melaksanakan program-program yang mungkin berasal dari pemerintah pusat, sehingga memperkuat sinergi antara Pemerintah pusat dan daerah dalam mencapai kesejahteraan sosial.

Dinas Sosial melaksanakan program-program sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan diantaranya Rekomendasi Reaktifasi kartu penerima bantuan iuran jaminan kesehatan (PBI-JK), pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Rekomendasi Bidik Misi, Pengelolaan Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT), Pendamping Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Sosial Kelompok Usaha Bersama. Di tengah dinamika sosial dan ekonomi yang terus berubah, angka kemiskinan di Kabupaten Pidie menunjukkan fluktuasi yang memerlukan perhatian serius.

Salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan adalah kurangnya akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja yang layak. Dalam konteks ini, Dinas Sosial tidak hanya berfungsi sebagai penyedia bantuan sosial, tetapi juga sebagai fasilitator yang menghubungkan

masyarakat dengan berbagai sumber daya dan program bantuan dari pemerintah pusat maupun daerah. Dari penjabaran diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Pidie Dalam Upaya Menurunkan Angka Kemiskinan”.

1.2 Rumusan Masalah dan Identifikasi Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

1. Kemiskinan merupakan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh Pemerintah Indonesia, termasuk Provinsi Aceh yang tercatat sebagai salah satu provinsi termiskin pada tingkat Nasional, termasuk Kabupaten Pidie. Kabupaten Pidie menghadapi tingkat kemiskinan yang tinggi dengan sekitar 18,78% penduduk hidup di bawah garis kemiskinan, disertai dengan kurangnya akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja yang layak.
2. Pemerintah Kabupaten Pidie belum berhasil secara signifikan menurunkan angka kemiskinan, menunjukkan perlunya perbaikan dalam implementasi Program *Sustainable Development Goals* (SDGs) melalui Program Bantuan di Dinas Sosial Kabupaten Pidie seperti Kartu Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK), Program Keluarga Harapan (PKH), Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan kolaborasi yang lebih baik dengan stakeholder serta masyarakat.

1.2.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Pidie dalam menurunkan angka kemiskinan?
2. Bagaimana Pelaksanaan Program program perlindungan sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Kabupaten Pidie dalam upaya menurunkan angka kemiskinan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berikut ini adalah tujuan kajian yang ingin dicapai dalam skripsi ini:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis fungsi Dinsos Kabupaten Pidie dalam

menurunkan angka kemiskinan.

2. Dalam upaya menurunkan angka kemiskinan, memahami dan mengevaluasi inisiatif perlindungan sosial dan pemberdayaan kelompok masyarakat kurang mampu di Kabupaten Pidie.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat kajian dapat dibagi menjadi beberapa kategori teoritis dan praktis berdasarkan pembahasan di atas:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Kajian ini diharapkan dapat memberikan wawasan teoritis mengenai fungsi Dinsos Kabupaten Pidie dalam upaya menurunkan angka kemiskinan. Kajian teoritis yang diangkat dapat memperkaya khasanah keilmuan di bidang administrasi publik, khususnya mengenai kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. Para akademisi dan peneliti lain yang ingin mempelajari lebih lanjut mengenai inisiatif yang diambil oleh pemerintah daerah untuk memerangi permasalahan kemiskinan mungkin akan merasakan manfaat dari kesimpulan kajian ini.

1.4.2 Manfaat Praktis

Temuan kajian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan saran kepada pemerintah Kabupaten Pidie untuk mengembangkan dan melaksanakan rencana yang lebih ampuh untuk menurunkan angka kemiskinan di daerah tersebut. Hasil dan evaluasi yang dilakukan dapat menjadi pedoman yang berguna bagi pembentuk undang-undang dalam mengambil langkah-langkah yang lebih fokus dan efisien untuk mengurangi kemiskinan yang bermanfaat bagi daerah tertinggal di Kabupaten Pidie. Selain itu, pemerintah daerah lain yang menghadapi kesulitan serupa dalam upaya menurunkan angka kemiskinan di daerahnya mungkin menganggap kajian ini sebagai sumber pengetahuan dan wawasan yang berguna.